

**INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**
(Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh
MEGA SENJA SELFIA
NPM 216.01.09.1.111



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
2020**

ABSTRAK

Permasalahan di Desa Pejambon yang menjadi alasan penulis mengkaji skripsi ini yaitu (1) Pemerintah Desa kesulitan dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan (2) Adanya kebijakan Open Government Partnership (OGP) memang meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pejambon tetapi tidak dalam evaluasi pembangunan.(3) Kurangnya pemahaman masyarakat Pejambon tentang kebijakan Open Government Partnership (OGP). Terdapat tiga rumusan masalah dalam skripsi ini : Pertama, Apa saja inovasi dari kebijakan OGP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pejambon. Kedua, Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur setelah adanya kebijakan OGP. Ketiga, Bagaimana pengaruh dari kebijakan OGP terhadap Desa Pejambon. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis inovasi dari kebijakan OGP dan bentuk partisipasi masyarakatnya serta pengaruh inovasi bagi Desa Pejambon. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan bisa membantu Pemerintah Desa Pejambon untuk memperoleh solusi dari masalah terkait kebijakan OGP dan bisa bermanfaat bagi desa lain untuk memajukan masyarakatnya.

Teori yang digunakan adalah teori inovasi menurut Rogers, teori partisipasi masyarakat menurut Yadav dan teori infrastruktur menurut Grigg. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu keterbukaan informasi, kemitraan, ruang partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, evaluasi pembangunan di Desa Pejambon, tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi-inovasi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP), sudah memenuhi atribut inovasi menurut Rogers yaitu aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon yaitu dalam pengambilan keputusan dengan ikut musrenbangdes, dalam pelaksanaan dengan ikut gotong royong, partisipasi memanfaatkan hasil pembangunan, dan tidak ada partisipasi dalam evaluasi pembangunan. Pengaruh OGP terhadap Desa Pejambon, untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik dan banyak infrastruktur yang berhasil dibangun. Inovasi kebijakan OGP oleh Pemerintah Desa Pejambon berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Saran peneliti adalah perlunya adanya sosialisasi terkait kebijakan OGP kepada masyarakat serta membuat wadah partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam evaluasi pembangunan.

Kata kunci : Inovasi, Open Government Partnership (OGP), Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

Problems in Pejambon village that are reasons for the writer to study this skripsi is : (1) Lack understanding of Pejambon community about Open Government Partnership (OGP) policy, (2) Existence of Open Government Partnership (OGP) policy indeed increases community participation in Pejambon Village but not on evaluation of development. (3) Pejambon Village Government has difficulty in mobilizing the community in infrastructure development. There are three problem statements on this skripsi : Firstly, about what are innovations of OGP policy to increase community participation on infrastructure development in Pejambon village. Secondly, how forms participation of Pejambon Village community on infrastructure development after OGP policy appears. Third, the influence from OGP's policy innovations against Pejambon village. This research aims to describe and analyse innovation from OGP policy and forms of community participation and innovation influence for Pejambon village. Benefit of this research is expected able to help Pejambon Village Government find solution of problem related to OGP policies and be useful for other village to advance communities participation.

The theory used is the theory of innovation according to Rogers, theory of community participation according to Yadav and theory of infrastructure according to Grigg. The research methods used are descriptive with a qualitative approach. Focus of this research is transparency, partnership, forum for community participation activities, use technology as communication tools with Pejambon Village community, participation decision making , implementation of development, utilization of development results, and evaluation of development, level of community participation and succesfull infrastructure development. The techniques of data collection are done by observation, interviews and documentation. Research location in the Pejambon Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency. The data analysis used is the Miles and Huberman models.

The results shows that innovations from Open Government Partnership OGP policy have fulfilled the attribute of innovation according to Rogers, which is aspects of relative advantage, compatibility, complexity, triability, and observability. Then the form of community participation carried out by Pejambon Village community is participation decision making with join musrenbangdes, implementation of development with join mutual cooperation, utilization of development results, and development evaluation. OGP's influence on Pejambon village for the level of community participation in development is quite good and also many infrastructures are successfully built. OGP policy innovations carried out by Pejambon Village Government have succeeded in increasing community participation on infrastructure development. However, the village government still needs conduct socialization about OGP policy for Pejambon community and create a forum for community participation on development evaluation.

Keywords : Innovation, Open Government Partnership (OGP), Community Participation, Infrastructure Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Open Government bukan menjadi suatu hal yang baru lagi bagi Negara Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sudah mulai menjalankan konsep open government meskipun belum optimal. Open Government adalah suatu pemerintahan yang dalam kegiatan pengelolaan negaranya dilakukan secara terbuka yaitu dengan adanya transparansi dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta berkerjasama dalam mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada dalam pemerintah demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi pemerintah terhadap publik merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah

Dengan adanya keterbukaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbangun. Jika kepercayaan publik kepada pemerintah terbangun dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional maupun di daerah juga akan meningkat. Karena keterbukaan pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dengan pemerintah akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Motivasi itulah yang mendorong Pemerintah Indonesia bergabung dan menjadi salah satu perintis

gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang telah diluncurkan pada bulan September 2011.

Open Government Partnership (OGP) adalah gerakan di tingkat internasional yang mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan dimana setiap negara anggota yang tergabung dalam gerakan ini mempunyai perwakilannya masing masing untuk pengambilan kebijakan. Bukan hanya perwakilan negara anggota saja, tetapi juga terdapat masyarakat sipil seperti kalangan swasta, LSM, akademisi serta organisasi gerakan.

Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif dari beberapa negara yang mempunyai tujuan mewujudkan komitmen dari pemerintah kepada warganya untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan masyarakat, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat sistem pemerintahan secara global. Diawali oleh sekelompok pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil yang menyadari bahwa banyak orang menuntut pemerintahan haruslah transparan dan akuntabel maka terbentuklah gerakan Open Government Partnership (OGP). Indonesia merupakan salah satu negara anggota dalam gerakan Open Government Partnership (OGP) ini.

Pada 20 September 2011, Open Government Partnership (OGP) secara resmi diluncurkan oleh 8 negara pendiri diantaranya Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat yang menyetujui Deklarasi Pemerintahan Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara. Dengan menyetujui deklarasi tersebut, artinya negara Indonesia ikut berkomitmen dalam upaya mendorong keterbukaan pemerintah yang

memberdayakan dan melayani masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dari tahun ke-tahun, jumlah negara anggota Open Government Partnership terus bertambah pada tahun 2014 jumlah negara anggota Open Government Partnership (OGP) adalah 64 Negara, pada tahun 2016 berjumlah 75 Negara dan pada tahun 2019 berjumlah 79 negara. Pada tahun 2016 akhir, OGP ditingkat internasional membangun gagasan baru yaitu penerapan OGP ditingkat subnational/daerah. Ada lima *Pilot Project Open Government Partnership* atau daerah percontohan pemerintah terbuka diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung Dan Kabupaten Bojonegoro. Dalam ajang *Pilot Project* ini, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan banyak perhatian atas pelaksanaan pemerintah terbuka yang telah berhasil diterapkan pada pemerintahannya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu instansi pemerintahan di Indonesia yang terdepan dalam menerapkan gerakan Open Government Partnership (OGP) dibandingkan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Kang Yoto-Kang Hartono, telah berhasil menerapkan Open Government atau pemerintah terbuka.

Dikatakan demikian karena dari semua daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi *pilot project* atau percontohan pemerintah terbuka Open Government Partnership (OGP) dunia dan menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mewakili Indonesia dalam ajang tersebut.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership yang diadakan di Paris, Perancis pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro ikut hadir sebagai panelis dan menjadi satu-satunya daerah yang menjadi perwakilan asia tenggara, juga ada Kota Seoul Korea Selatan dan Tbilisi Georgia. Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejajar dengan Paris, Scotland, Madrid, dan 20 kota percontohan Open Government Partnership di dunia. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa pintu-pintu keterbukaan diantaranya *Open Data Contact*, Dialog Publik, SMS Radio, Blusukan, LAPOR pintu-pintu keterbukaan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan perwujudan dari gerakan Open Government Partnership (OGP)

Dalam pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, terdapat empat hal utama menjadi kunci pelaksanaannya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan kolaborasi empat sekawan yang dikenal dengan kolaborasi ABGC yaitu keterlibatan dan melibatkan Akademisi, Bussines, Government dan Community dalam perumusan berbagai kebijakan. Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 rencana aksi di Open Government Partnership. Lima rencana aksi tersebut :

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan multidimensi
- 2) Penguatan keterbukaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Smart City dan keterbukaan pemerintah desa
- 4) Pembangunan inklusif dan responsif gender
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik (sektor kesehatan dan administrasi kependudukan)(Opengovbojonegoro.com).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menerapkan Open Government Partnership (OGP) diseluruh wilayah Bojonegoro tepatnya di 430 desa, tetapi

sejauh ini baru beberapa desa saja yang sudah menerapkan sistem tersebut. Salah satunya adalah Desa Pejambon. Desa Pejambon merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah 189.190 Ha dan jumlah penduduk sekitar 2126 jiwa

Sejak tahun 2016 akhir, Desa Pejambon telah menerapkan Open Government Partnership (OGP). Dengan adanya Open Government Partnership (OGP), pemerintah desa berharap bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa terutama infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyaknya jalan-jalan yang tidak layak pakai atau rusak serta tidak tersedianya fasilitas infrastruktur lainnya seperti irigasi, drainase, gedung posyandu, gedung sekolah mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur .

Partisipasi masyarakat dari setiap bagian desa sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat serta pengawasan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa, maka pemerintah Desa Pejambon melakukan hal baru yaitu dengan inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP). Dengan adanya inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP) pemerintah Desa Pejambon berharap inovasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa khususnya infrastruktur di Desa Pejambon.

Inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan Pemerintah Desa Pejambon juga berlandaskan atas hukum diantaranya :

- 1) Undang- undang Nomor 6 tahun 2004 Pasal 81 ayat 2 bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 bahwa setiap instansi pemerintah bisa melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat tercapainya *good governance*.
- 3) Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro bahwa :
 “Memerintahkan kepala desa untuk mengumumkan secara transparan informasi tentang penyelenggaraan desa pada tempat-tempat umum dalam bentuk spanduk, banner ,dimuat dalam website desa dan mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kepada Bupati Bojonegoro”.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik bahwa :
 “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkakan dengan memperhatikan keterlibatan partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.”

Inovasi dari kebijakan Open Govenment Partnership yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon meliputi keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa melalui media luar luangan seperti baliho dan website desa, kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil maupun lembaga-lainnya, serta penyediaan ruang partisipasi masyarakat oleh pemerintah desa.

Berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan dari maka ada beberapa aspek yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian :

1. Pemerintah Desa Pejambon masih kesulitan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa khususnya infrastruktur

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa merasa kesulitan untuk menemukan cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga melihat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya, melalui Open Government Partnership (OGP) serta adanya Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2016 membuat Pemerintah Desa Pejambon tergerak untuk melaksanakan inovasi OGP.

2. Adanya kebijakan OGP memang membuat partisipasi masyarakat di Desa Pejambon meningkat, tetapi tidak dalam evaluasi pembangunan.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan meningkat tetapi tidak ada partisipasi dalam evaluasi pembangunan, padahal partisipasi ini penting karena feedback dari masyarakat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Pejambon melaksanakan pembangunan selanjutnya.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pejambon tentang inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP)

Pemahaman masyarakat Desa Pejambon yang masih kurang terkait inovasi kebijakan Open Government Partnership oleh disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pejambon.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengambil judul **“Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Partnership (OGP) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa** (Studi pada di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja inovasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Partnership (OGP) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon terhadap pembangunan infrastuktur desa setelah adanya kebijakan Open Government Partnership (OGP) ?
- 3) Bagaimana pengaruh dari adanya Inovasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) terhadap Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis Inovasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Open Government Partnership (OGP) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

- 2) Mengambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur daerah setelah diterapkannya Open Government Partnership.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Open Government Partnership di Desa Pejambon

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya mempunyai manfaat. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - Dapat memberikan tambahan wawasan tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan inovasi kebijakan, Open Government Partnership, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
 - Menjadi referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan bidang penelitian yang sama.

- 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah Desa Pejambon untuk bisa memperoleh solusi terkait masalah yang masih timbul dalam pelaksanaan kebijakan Open Government Partnership (OGP) dan juga bisa bermanfaat bagi desa lain di Indonesia yang masih tertinggal untuk memajukan masyarakatnya melalui pelaksanaan Inovasi Kebijakan Open Government Partnership.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti serta analisis yang telah diberikan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

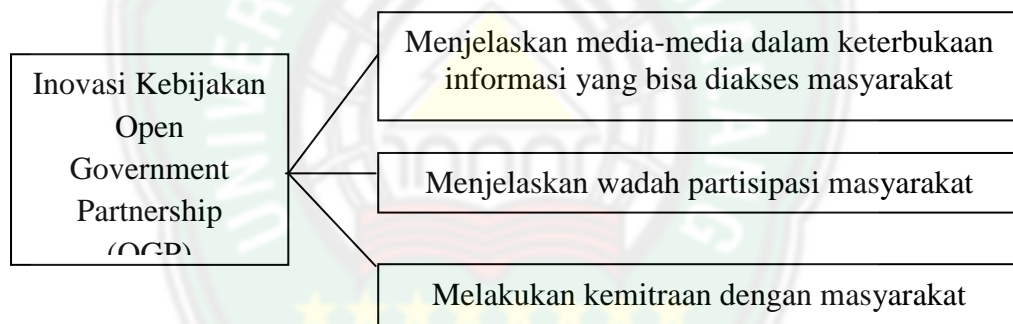
1. Inovasi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pejambon diantaranya : 1) Keterbukaan informasi, ada empat bentuk yaitu : Media Luar Ruang, Media Teknologi Informasi, Media Tatap Muka, Pemasangan Display Layanan Informasi. 2) Kemitraan, dengan : Bojonegoro Institute (BI), Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Universitas 17 Agustus Surabaya dan Universitas Airlangga. 3) Ruang partisipasi masyarakat yaitu Musrenbangdes dan Program Basis Lingkungan. 4) Pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, yaitu SMS Center Desa serta media sosial facebook, instagram, twitter dan youtube. Inovasi-inovasi tersebut sudah memenuhi atribut inovasi menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008:17-18) yaitu aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon sudah sesuai dengan menurut yadav (A.Theressia *et al*, 2014:198) yaitu :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan ikut menjadi bagian dari kegiatan musrenbangdes.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan program basis lingkungan disetiap RT dengan gotong royong, memberikan kontribusinya berupa tenaga, material
 - c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dengan ikut menjaga hasil pembangunan infrastruktur
 - d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan, tidak ada partisipasi masyarakat didalamnya karena evaluasi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan setiap akhir tahun
3. Pengaruh adanya inovasi kebijakan Open Government Partnership (OGP) terhadap Desa Pejambon :
- a. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur desa sudah baik, terutama partisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.
 - b. Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur, semenjak adanya inovasi Open Government Partnership (OGP) banyak infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Pemerintah Desa Pejambon diantaranya yaitu jenis infrastruktur : Sistem pengelolaan air limbah, Fasilitas transportasi, Sistem penyediaan air, Sistem kelistrikan, Gedung publik, Taman Kota.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa Pejambon antara lain :

- 1) Pemerintah Desa Pejambon seharusnya lebih banyak mengandeng komunitas-masyarakat yang ada di Desa Pejambon sehingga lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- 2) Pemerintah Desa Pejambon perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa terkait Open Government Partneship (OGP) karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan ini.



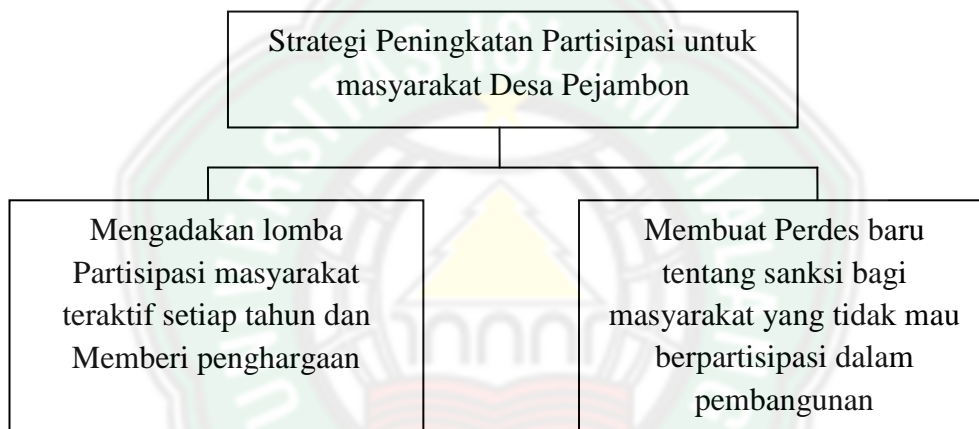
Berdasarkan bagan konsep diatas, pemerinah desa pejambon bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa dengan menjelaskan secara rinci isi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP).

- 3) Pemerintah Desa Pejambon harus membuat wadah partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan .
- 4) Pemerintah Desa Pejambon harus sering mengupdate informasi tentang kegiatan pembangunan mereka pada akun media sosial milik Desa, Pemerintah Desa jarang mengupdate informasi pada akun media sosial milik mereka baik itu facebook, twitter, maupun youtube, sehingga adanya akun media sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat ini media sosial bisa

menjadi sarana yang tepat untuk mengajak masyarakat Desa Pejambon untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.

- 5) Pemerintah Desa Pejambon bisa membuat strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti membuat perdes baru dan juga melakukan inovasi lainnya. Misalnya seperti berikut :

Bagan Konsep Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat



Berdasarkan bagan konsep diatas, strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah inisiatif dari peneliti. Dengan adanya pengadaan lomba partisipasi masyarakat dengan memilih masyarakat teraktif setiap tahunnya, menurut peneliti akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena seperti yang kita tahu semua orang suka jika di berikan hadiah apalagi hadiah tersebut merupakan apresiasi dari pemerintah desa. hal ini akan memotivasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Selain itu peneliti juga mengusulkan agar pemerintah desa membuat PerDes baru tentang sanksi yang diberikan jika tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan seperti memberikan kontribusi material.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan “ Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : Alfabeta.
- Deputi Inovasi Administrasi Negara-LAN, 2016. Buku Seri Inovasi Administrasi Negara Seri 2 “*Pengembangan Model & Story Inovasi Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik*” Jakarta Pusat. publish Pusat INTAN-DIAN-LAN
- J.Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya:Bandung
- Kadji Yulianto,2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan “ Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.Gorontalo* : UNG Press Gorontalo
- Kodatie, Robert J. 2005 *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara, 2014. *Handbook Inovasi Administasi Negara* . Lembaga Adinistrasi Negara Pusat INTAN-DIAN-LAN
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung : Alfabeta
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN Press, Jakarta
- Theresia Aprilia dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat “Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pegembangan Masyarakat”*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Adam Latif, dkk, 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rinjang Kabupaten Sindereng Rappang*. Jurnal Moderat. Vol 5, No 1

- Achmad Irgi Riza Artandi dan Indah Prabawati, 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Open Government Partnership di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Dialog Publik)* Vol.6, No.5
- Ahmad Sururi, 2016. *Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)*. Jurnal Sawala Vol 4 No 3
- Andi Asnudin, 2009, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*. Jurnal SMARTek, Vol. 7, hal 292 – 300
- Asnar, 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda*. Jurnal Studi Sosial, Vol 1 No 2, hal 121-131
- Deru R Indika dan Nike V, 2018. *Increasing Transparency and Community Participation through the Open Government Partnership in Bojonegoro Regency*. Atlantis Press
- Faria R, Yanuar K. Sari dan Bintang R. Sakinah, 2017. *The Implementation Of Open Government In Bojonegoro Regency, East Java Province*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol.43 No.2
- M. Hendra Kurniawan, 2014. *“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PPIP)”*. Jurnal Mahasiswa Unesa. Vol.2 No.3
- Mustikawati, 2016. *“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”*. E-journal Ilmu Administrasi Negara . Vol 4 No.2

Internet

- Anonim, 2013. *“open government partnership summit”*
<http://sinergantara.or.id/berita/open-government-partnership-summit-2013>
 diakses pada 28 September 2019 pukul 13.04
- Anonim, 2015-2018, *” Profil Desa Pejambon”* <https://pejambon.co.id-profil-desa>
 diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 17.08
- Kusnandaka Tjatur, Dinas Kominfo. *“Menuju Gerbang Dunia Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia”* <http://repo.databojonegoro.com/Materi/OGP.pdf>
 diakses Pada pada 2 Oktober 2019 pukul 19.10

- M. Lauranti, dkk. 2017. *Open Government : mengkaji penggunaan e-government pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakasara
opengovbojonegoro.com/Pelaksanaan_renaksi diakses 15 November 2019
- PWYP Indonesia, 2017. *Resep Keterbukaan Ala Bojonegoro*.
<https://pwypindonesia.org/id/resep-keterbukaan-ala-bojonegoro/> diakses pada 15 oktober 2019
- Pusdatin, 2012 “*Open Government Indonesia*”<http://dephub.go.id/post/read/open-government-indonesia-ogi-13385> diakses 28 September 2019 pukul 10.51
[opengovbojonegoro.com/Pemerintah terbuka](http://opengovbojonegoro.com/Pemerintah_terbuka) diakses pada 17 November 2019 pukul 20.34
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21630/BAB%20II%20KERANGKA%20TEORITIS.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada 3 Januari 2020 pukul 12.38

Lainnya

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik

Skripsi

- Zulkarnain M.F, 2017. “*Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar*”. Makassar : Universitas Hassanudin.
- Taufiqurakhman, 2014. *Kebijakan Publik “Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Peyelenggara Pemerintahan”*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers